

RINGKASAN

Ndaru Kartiko, 2018, **Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo**. Hartatik, S.sos., M.Si, Drs. Ismail Pandji, M.Si. 91 hal + XVIII

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya di butuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang. Oleh karena itu pedagang kaki lima ini seringkali menjadi target utama pemerintah dalam masalah kebijakan. Salah satu contoh keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memerlukan penataan tempat usaha agar terlihat tertib, rapi dan teratur juga memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi dan kebersihan lingkungan, pemanfaatan fasilitas umum serta rencana tata ruang daerah di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kraksaan tersebut masih terbilang kurang strategis dalam penataan tata ruangnya. Sehingga kewenangan pemerintah untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di daerah tersebut diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo.

Di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo awal keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berada di sekitar Alun-alun Kota Kraksaan. Memang awalnya dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Alun-alun Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo cukup menguntungkan pihak PKL itu sendiri yaitu kegiatan usaha mereka terbilang cukup ramai dikarenakan tempat yang strategis, dengan direlokasikannya tempat kegiatan usahanya tersebut mereka kurang mendapatkan keuntungan bahkan cukup terbilang sepi. Sehingga para pedagang kaki lima (PKL) tersebut berharap agar kegiatan usaha yang mereka jalani bisa kembali seperti sebelumnya yaitu bisa ramai dan keuntungan yang mereka dapat bisa lebih besar dari pada kegiatan usaha yang saat ini berjalan di tempat relokasi yang baru. Sehingga hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul perlu dilakukan pemilahan yang prosesnya antara lain meliputi: Pemilihan data yang relevan, Penyajian data, Menghubungkan, membandingkan dan

mencari persamaan antar data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah informasi ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam penataan tata ruang keberadaan PKL, Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan penataan tata ruang terhadap pedagang kaki lima, dan dampak dari penataan tata ruang terhadap masyarakat, maka hasilnya yaitu peran Satpol PP dalam Penataan PKL memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, sehingga diharapkan dengan adanya penataan tersebut PKL bisa menjual barang dagangannya sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat dengan terciptanya lingkungan yang bersih, rapi dan tertib. Selain itu pembinaan terhadap pedagang kaki lima secara menyeluruh sebenarnya dilakukan oleh Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait lainnya. Sehingga peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam wujud menegakkan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya dari segi hukum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dipahami oleh masyarakat, faktor penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo secara kualitas maupun kuantitas belum memenuhi standar, sarana/ fasilitas pendukung yang belum memadai, kondisi masyarakat yang belum memahami pentingnya tujuan peraturan daerah tersebut, serta faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap aturan tersebut tidak penting.

Dampak dari Penataan Tata Ruang Terhadap Masyarakat di Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo yaitu dalam sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang di tempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya, serta PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Kata Kunci: Peran Satuan Polisi Pamong Praja, Penataan Pedagang Kaki Lima

Summary

Ndaru Kartiko, 2018, The Role of the Civil Service Police Unit on the Arrangement of Five-Foot Merchants (PKL) at the Kraksaan City Civil Service Police Unit in Probolinggo Regency. Hartatik, S.sos., M.Sc, Drs. Ismail Pandji, M.Sc. 91 things + XVIII

The existence of street vendors has opened up jobs so that the unemployment rate can be suppressed and its existence is needed by the lower classes because of the relatively cheaper prices of modern shops or restaurants. But the existence of street vendors besides being profitable also brings new problems. Like the activities of street vendors (PKL) who use sidewalks and roads or road bodies as places of trade. Therefore, street vendors are often the government's main target in policy matters. One example of the existence of street vendors (PKL) who open the arrangement of business premises so that they look orderly, neat and orderly also pay attention to social, economic and environmental cleanliness, utilization of public facilities and regional spatial plans in Kraksaan City, Probolinggo Regency. The existence of street vendors (PKL) in Kraksaan City is still somewhat less strategic in its spatial planning. So that the authority of the government to make arrangements for street vendors who carry out business activities in the area was handed over to the Probolinggo District Civil Service Police Unit (Satpol PP).

In Kraksaan City, Probolinggo Regency, the initial presence of street vendors (PKL) was around Kraksaan City Square. Indeed, initially with the presence of street vendors (PKL) around the Kraksaan Town Square in Probolinggo Regency, it was quite beneficial for the street vendors themselves, namely their business activities were quite crowded due to their strategic location, with the relocation of their business activities they were not even profitable. quiet. So that the street vendors (PKL) hope that the business activities they lead can return as before, which can be crowded and the benefits they can get can be greater than the business activities currently running in the new relocation site. So that this needs to be analyzed further. The research approach used in this study is a qualitative approach.

The collected data is then analyzed by the following steps: Data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. Then the collected data needs to be sorted out, the process of which includes: Selection of relevant data, presentation of data, linking, comparing and finding similarities between the data obtained so that it becomes a scientific information that can be accounted for.

Based on the results of research and data analysis that has been carried out on the role of the civil service police unit in structuring the spatial layout of street vendors' existence, what factors influence the spatial arrangement policy for street vendors, and the impact of spatial planning on the community, the results are the

role of the Satpol PP in PKL Arrangement has a very important role in it, so it is expected that with this arrangement, street vendors can sell their merchandise according to the place determined by the local government by creating a clean, neat and orderly environment. In addition, overall guidance for street vendors is carried out by the Market Service or the Department of Industry and Trade and other relevant agencies. So that the role carried out by the Civil Service Police Unit as a regional apparatus in the form of enforcing these provisions cannot be carried out optimally.

The role of the Probolinggo District Civil Service Police Unit in controlling and fostering Street Vendors has not been maximally implemented, this is due to several factors both internal and external, including in terms of law which in this case is Regional Regulation No. 11 of 2012 concerning the Arrangement and Empowerment of Foot Traders Lima (PKL) has not been understood by the public, the law enforcement factor, namely the Probolinggo District Civil Service Police Unit in quality and quantity has not met the standards, inadequate supporting facilities / facilities, conditions of the people who do not understand the importance of the regional regulations, and community cultural factors who still consider these rules not important.

The Impact of Spatial Arrangement on Communities in Kraksaan City, Probolinggo Regency, namely in the informal sector of street vendors (PKL) is a rescue belt that accommodates excess labor that is not accommodated in the formal sector, so as to reduce unemployment, increase vitality for the area in which it is located as well as acting as a liaison between city service functions with each other, and street vendors also provide services to people who move around the street vendors, so they get easy and fast service to get the items they need.

Keywords: The Role of the Civil Service Police Unit, Arrangement of Street Vendors